

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perseorangan, membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (syarikat) dagang dengan berbagai bentuk. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 259).

Dengan penggabungan kekuatan perseorangan tadi, terjadilah suatu kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan lancar. Namun Islam memberi batasan atas usaha yang dilakukan, baik oleh perseorangan maupun kelompok. Yaitu yang dapat dikategorikan halal dan mengandung kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT. :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
(المائدة : ٢٠)

"Dan tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan pelanggaran". (Al Qur'an, 5 : 2).

Salah satu contoh dari bentuk usaha perkongsian yang banyak terjadi di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia, adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak (pemilik modal dan pekerja).

Dalam praktek kehidupan kaum muslimin, kerja sama bagi hasil sudah sering dilakukan. Antara lain dapat diamati pada pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara nelayan dan majikan di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Madura.

Bagi hasil ikan bagi masyarakat Klampis merupakan salah satu sistim bermu'amalah yang sudah menjadi mata-pencarian sejak nenek moyang mereka. Hal itu telah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dengan demikian sistim bagi hasil merupakan hal yang membudaya di Kecamatan Klampis. Sistim ini masih dipertahankan sampai sekarang, bahkan berkembang. Pada waktu dahulu para nelayan yang ingin menangkap ikan di laut, peralatan yang dipergunakan berupa alat-alat tradisional seperti; dayung, perahu kecil, jaring biasa/kecil, dan lampu templek. Namun sekarang sudah berkembang dengan adanya alat-alat moderen seperti; mesin tempel, perahu besar, purse-sein, lampu strongking dan lain-lain.

Disamping itu keadaan masyarakat Kecamatan Klampis ini sendiri dimana lapisan masyarakat pada umumnya, ada yang tingkat ekonominya kuat dan ada yang lemah. Dalam hal ini, masyarakat yang tingkat ekonominya lemah, dapat bergabung dengan pemilik modal dalam usaha penangkapan ikan. Sedang bagi yang tingkat ekonominya kuat, akan segera membeli alat-alat moderen tersebut guna memenuhi ke-

butuan yang belum dapat dijangkau pada saat itu. Jadi, keuntungan bagi hasil itu merupakan tambahan income bagi mereka.

Selain itu antara nelayan (pendega) dengan majikannya dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling tolong menolong antara mereka.

B. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dipelajari adalah "Praktek pelaksanaan bagi hasil ikan di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Madura". Agar masalah ini menjadi jelas, maka perlu dikaitkan dengan kehidupan beragama para pelakunya. Menurut hasil pengamatan, mereka adalah orang-orang beragama Islam. Dengan demikian seharusnya mereka merasa terikat pada norma-norma hukum Islam. Sehingga rumusan masalahnya menjadi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Ikan di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Madura".

C. Pembatasan masalah



Pembatasan masalah di sini hanya dibatasi dengan segi waktu saja, yaitu selama tahun 1991. Dengan demikian masalah ini dapat dirumuskan menjadi: "Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil ikan di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Madura selama tahun 1991".

D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan :

1. Bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan bagi hasil ikan di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Madura selama tahun 1991 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan bagi hasil ikan tersebut ?

E. Tujuan studi

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan bagi hasil ikan di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Madura selama tahun 1991.
2. Untuk menetapkan hukum apakah pelaksanaan bagi hasil

Penunjukan kelima sampel tersebut sudah cukup untuk dijadikan responden, karena pada dasarnya sistim pelaksanaan bagi hasil ikan di Kecamatan Klampis adalah sama.

4. Data yang berhasil digali

Data-data yang berhasil digali dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sistim perjanjian bagi hasil ikan yang meliputi :

- Pengertian bagi hasil ikan
- Unsur-unsur bagi hasil ikan
- Akad perjanjian bagi hasil ikan
- Bentuk-bentuk kerja sama bagi hasil ikan
- Cara-cara pembagian hasil ikan.

5. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data dalam studi ini dapat diperoleh dari :

- a. Pemilik modal (majikan) dan
- b. Para pekerjanya (pendega).

6. Teknik penggalian data

Untuk mendapatkan data di atas ini sumbernya di -
gunakan teknik wawancara. Dengan teknik penggalian da-
ta wawancara ini diharapkan diperoleh data-data tentang
pelaksanaan perjarjian bagi hasil ikan.

7. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari lapangan, dirumuskan akan dianalisis secara kuantitatif dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- Editing, yaitu pengolahan data guna memperoleh kejelasan, kesesuaian dan kelengkapan data. Melalui editing ini, sesuatu data akan dipastikan bisa terpa-kai atau tidaknya. (Sanapiah Faisal, 1981 : 45).
- Pengorganisasian data, yaitu usaha mengklasifikasi jawaban-jawaban para responden menurut macamnya. Je-lasnya pengorganisasian data ini, guna menghasilkan bahan-bahan untuk perumusan deskripsi. (Koentjara - ningrat, 1981 : 332).
- Analisis data, yaitu untuk merumuskan deskripsi ten-tang pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan di Keca-matan Klampis Kabupaten Bangkalan Madura. Kemudian diherapkan memperoleh kesimpulan guna menjawab per - tanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. (Syachul-Hadi Permono, 1989 : 23-24).